



# LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN TELAAH UPAYA KINERJA PERWAKILAN BPK KALTARA PADA IKU PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PEMEROLEHAN KEYAKINAN MUTU PEMERIKSAAN TAHUN 2023 S.D 2024

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui Perpres tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diwajibkan untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, setiap instansi pemerintah, termasuk BPK, wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai lembaga, tapi juga wajib disusun oleh kepala satuan kerja yang ada di BPK termasuk Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Pengendalian mutu pemeriksaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam menjaga integritas dan kualitas hasil pemeriksaan BPK. Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang wajib dipenuhi oleh perwakilan adalah Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan berbagai upaya sistematis dan berkelanjutan guna memenuhi target IKU tersebut, dengan mengintegrasikan kegiatan pengendalian mutu dalam setiap proses pemeriksaan.

Telaah ini bertujuan untuk menilai capaian, tantangan, serta rekomendasi atas pelaksanaan pengendalian mutu dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan selama tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024

## 2. Dasar Hukum

Berikut ini adalah dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Analisis Kebijakan terhadap IKU Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan:

- a. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- b. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Manajemen Mutu Pemeriksaan.
- c. Renstra BPK RI 2020-2024.
- d. Sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BPK Kaltara Tahun 2023-2024.
- e. Panduan Pelaksanaan Pengendalian Mutu Pemeriksaan (Monitoring dan Supervisi).
- f. Sistem Pengendalian Mutu Pemeriksaan (SPMP).
- g. Pedoman Monitoring dan Supervisi Pemeriksaan (Monwas).
- h. Kebijakan Kualitas dan Evaluasi Kinerja Tim Pemeriksa oleh Direktorat Evaluasi.
- i. Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

## 3. Metodologi Telaah

Metodologi Telaah dan Analisis terhadap Pemenuhan Capaian Kinerja IKU Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- a. Analisis dokumen evaluasi mutu (SPMP, laporan Monwas, hasil QA).
- b. Wawancara terbatas dengan Pengendali Teknis dan Pemeriksa Senior.
- c. Kompilasi data capaian IKU pada dashboard e-Kinerja Perwakilan.
- d. Telaah tindak lanjut atas temuan QA dan evaluasi internal 2023-2024.

## 4. Kondisi dan Upaya yang telah dilakukan

### A. Pemenuhan Pengendalian Mutu Pemeriksaan

#### 1) Kebijakan dan Prosedur Internal

- a) Telah diterapkan checklist mutu pemeriksaan secara sistematis di seluruh penugasan.
- b) Penugasan pemeriksaan disertai dokumen SPMP yang diverifikasi oleh pengendali teknis.
- c) Peningkatan peran Kepala Subauditorat sebagai pihak pengendali strategis mutu.

#### 2) Monitoring dan Supervisi (Monwas)

- a) Tahun 2023: Monwas dilaksanakan pada 100% penugasan strategis dan LKPD.
- b) 2024 s.d. Triwulan II: Realisasi Monwas mencapai 83,3% dari target semester I.
- c) Monwas mencakup penilaian:
- d) Kelengkapan dan kualitas dokumentasi KKP.
- e) Kepatuhan terhadap rencana pemeriksaan.
- f) Ketepatan waktu dan hasil temuan.

#### 3) Peningkatan Kompetensi Pemeriksa

- a) Penyelenggaraan KTF internal bertema “Integritas dan Akurasi dalam Pemeriksaan” sebanyak 3 kali di tahun 2023.

- b) Rata-rata keikutsertaan pelatihan mutu oleh pemeriksa BPK Kaltara > 95% dalam dua tahun terakhir.
  - 4) Perbaikan Tata Kelola Penugasan
    - a) Penjadwalan audit lebih disiplin untuk memberi ruang waktu review internal.
    - b) Penggunaan aplikasi e-Script dalam dokumentasi mutu dan SPMP.
- B. Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**
- 1) Self Assessment Mutu (SAM)
    - a) Dilakukan setiap akhir semester oleh Ketua Tim Pemeriksa dan diverifikasi oleh Pengendali Teknis.
    - b) Capaian skor rata-rata SAM 2023 sebesar 91,25% - menunjukkan mutu sangat baik.
  - 2) Quality Assurance (QA) oleh Direktorat Evaluasi
    - a) Pemeriksaan QA dilakukan pada LKPD Kabupaten Malinau dan Pemeriksaan Kinerja Bidang Kesehatan.
    - b) Hasil QA 2023 menunjukkan tidak ada temuan major dan memberikan penilaian “baik”.
    - c) Semua rekomendasi QA telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu ≤ 30 hari.
  - 3) Penjaminan Mutu oleh Reviewer Internal
    - a) Diterapkan sistem rotasi reviewer dari tim pemeriksa senior untuk meminimalkan bias.
    - b) Reviewer melakukan uji petik atas risiko audit dan simpulan pemeriksaan.
  - 4) Penguatan Budaya Mutu
    - a) Disisipkan dalam pembinaan rohani (bimtal), serta disosialisasikan dalam apel mingguan.
    - b) Pemeriksa dengan komitmen tinggi terhadap mutu diberikan apresiasi oleh Kepala Perwakilan.

## 5. Analisis Kinerja IKU

Tahun	Capaian Pengendalian Mutu	Capaian Keyakinan Mutu	Status IKU
2023	78,00%	91,25%	Tidak Tercapai
2024	96,00%	Dalam proses QA dan QC	Tercapai

### Tantangan:

- a. Keterbatasan waktu antara akhir pekerjaan lapangan dan deadline penyusunan LHP.
- b. Kebutuhan akan penyegaran teknis bagi Pemeriksa Baru terkait SPMP.
- c. Dinamika beban pemeriksaan yang meningkat pasca pemilu 2024.

## B. Pembahasan Dampak Analisis

### 1. Penjelasan Indikator Kinerja

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) dan eksternal melalui hasil penilaian evaluasi Direktorat EPP. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Upaya pada *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan dilaksanakan setelah pemeriksaan selesai. Sampai dengan akhir Tahun 2024 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan, QA dan QC seluruhnya dilaksanakan pada enam LHP pemeriksaan LKPD TA 2023. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan empat Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2024, dimana QA dan QC juga akan dilaksanakan seluruhnya pada 6 pemeriksaan tersebut. Hasil evaluasi Direktorat EPP berdasarkan data jumlah LHP yang dimuat dalam IHPS I 2024, dengan jumlah LHP yang dievaluasi sebanyak 6 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

### 2. Analisis Realisasi IKU Tahun 2024

Realisasi capaian IKU 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2022	2022	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%
Capaian Realisasi	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	96,00%
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	83,33%	88,57%	80,00%	78,00%	<b>96,00%</b>

Realisasi IKU 1 pada Tahun 2024 adalah sebesar 96,00% dari target 100,00%. Sehingga capaiannya sebesar 96,00%. IKU ini diukur melalui dua sub IKU yaitu Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker (bobot 40%) dengan realisasi sebesar 100% dan Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi Direktorat EPP (bobot 60%) dengan realisasi sebesar 93,33%, yang terdiri

dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 83,33% dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa tetap perlu adanya upaya perbaikan terhadap pada proses QA dan QC satker, sehingga LHP yang diterbitkan dapat memperoleh Tingkat Konsistensi dan Tingkat Akurasi yang lebih baik lagi kedepannya.

### 3. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja pada IKU

Realisasi IKU 1 pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2023, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 22,00%. Perolehan realisasi IKU ini pada Tahun 2024 merupakan perolehan realisasi tertinggi jika dibandingkan periode Renstra Tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kendala atas Ketidakcapaian tersebut disebabkan oleh Hasil Evaluasi Akurasi dan Konsistensi atas LHP yang dimuat dalam IHPS 1 Tahun 2024 pada Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penyusunan IHPS 1 Tahun 2024 oleh Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai 93,33%. Bila dirinci lebih lanjut, perhitungan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP yang mendapatkan nilai 83,33% dengan rincian konsistensi jumlah LHP sebanyak 1 dari 6 LHP dan terdapat 3 jumlah kasus pada konsistensi. Penilaian tingkat akurasi mendapatkan nilai 100,00% dengan rincian akurasi angka jumlah LHP sebanyak 6 LHP dengan tidak ditemukannya jumlah kasus akurasi pada LHP tersebut.

Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian target IKU selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *cross review* internal antar tim Pemeriksa atas konsep LHP sebelum diterbitkan, dari setiap tim Pemeriksa setiap entitas pemeriksaan;
2. Meningkatkan Peran Tim Penjaminan Mutu;
3. Melakukan analisis risiko di tahap perencanaan pemeriksaan untuk menentukan fokus dan prioritas, serta pelaksanaan Mitigasi Risiko dengan Menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan;
4. Melaksanakan proses *checker* berjenjang terhadap kualitas mutu LHP.

#### 4. Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan terus melakukan reuiu LHP secara berjenjang, mendorong tim pemeriksa untuk lebih memperhatikan konsistensi dalam penyusunan LHP, melakukan *cross review* internal antar tim Pemeriksa atas konsep LHP sebelum diterbitkan, membuat sistem *checker* LHP agar dapat digunakan oleh setiap tim pemeriksa dalam melakukan *cross review*, Penguatan Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) berupa melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu Internal untuk mengidentifikasi kelemahan, Peningkatan Kompetensi SDM berupa mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk auditor agar memahami standar pemeriksaan dan pengendalian mutu terkini serta Coaching dan Mentoring untuk setiap pemeriksa.

Untuk mempertahankan pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian mutu (*Quality Control*) dan pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) atas setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan, Mengintegrasikan QA dalam setiap tahapan pemeriksaan untuk memastikan dokumen pemeriksaan sesuai standar dan Memanfaatkan *Big Data Analytics* untuk mendukung keyakinan mutu melalui analisis risiko dan deteksi penyimpangan yang lebih efektif. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan realisasi IKU ini dapat dipertahankan hingga periode Renstra tahun selanjutnya.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024 sebesar Rp5.124.208.012 yang terdiri dari Rincian Ouput LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Rincian Output LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi IKU tahun 2024 akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

Dengan demikian IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan 2024. Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 1 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Tabel. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>IKU 1</b> Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	96,00%	96,00%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 1 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas reviu hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik dan PMP.

## C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

BPK Kaltara telah menunjukkan kinerja yang solid dalam pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan. Pelaksanaan Monwas, evaluasi internal, dan pemanfaatan sistem mutu telah terlaksana optimal, mendukung pencapaian IKU secara konsisten pada tahun 2023 dan tetap on track pada pertengahan 2024.

### 2. Rekomendasi

- a. Penerapan Digital Review Tools: Memaksimalkan e-SPMP dan integrasi dengan e-KKP untuk efisiensi reviu.
- b. Perkuat Proses QA Internal Sebelum QA Eksternal: Menginisiasi mock review sebagai simulasi QA.
- c. Pembentukan Tim Auditor Mutu Internal (AMI): Bertugas memantau pelaksanaan pengendalian mutu lintas tim.
- d. Reformulasi Indikator Mutu Tim Pemeriksa: Menjadikan mutu sebagai bagian dari evaluasi kinerja individu.

Tarakan, 31 Maret 2025

**Pengelola Manajemen Kinerja  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**